

## Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden Di Filipina Tahun 2001 – 2011

**Etha Pasan**

*Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*

**Abstract:**

*The constitution of the Philippines Chapter II Article 26 stipulates the prohibition of political dynasties, but in reality, political dynasty still occurs in presidential elections, as has happened in the year 2001-2011. Political dynasty that occurs in elections, at the congressional, legislative, and presidential, raises the pros and cons in the community. Regardless of the pros and cons, the existence of political dynasties has tarnished the democratic system adopted by the Philippine government. The election of Gloria Macapagal Arroyo and Benigno Simeon Aquino showed inconsistencies between the rules and practices.*

**Keywords:** *Philippines Constitution, Political Dynasties, Social Structure, Political Clans Complex*

**Abstrak:**

*Dalam konstitusi Filipina di Bab II ayat 26 terdapat larangan bagi keberadaan politik dinasti, namun dalam kenyataannya politik dinasti masih terjadi pada pemilihan presiden sebagaimana telah terjadi sejak tahun 2001 -2011. Politik dinasti yang terjadi pada pemilihan umum ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Terlepas dari itu keberadaan politik dinasti telah melemahkan demokrasi Filipina. Terpilihnya Gloria Macapagal Arroyo dan Benigno Simeon Aquino menunjukkan inkonsistensi antara aturan dan praktek yang terjadi.*

**Kata Kunci :** *Konstitusi Jepang, Kapabilitas Militer, Kompleksitas Keamanan Regional*

Di dalam Konstitusi Filipina pada Bab II, Pasal 26 dijelaskan bahwa “*The State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law.*” Pasal tersebut menegaskan perihal larangan terhadap politik dinasti dan bahwa negara harus menjamin akses yang sama bagi setiap warga negara terhadap kesempatan untuk pelayanan publik. Konstitusi Filipina kemudian diamandemen pada tahun 2005, dan larangan mengenai politik dinasti kembali ditegaskan pada Pasal 115. Pada pasal ini dijelaskan mengenai batasan atau lingkup mengenai politik

dinasti, yakni orang-orang yang memiliki hubungan langsung atau hubungan keluarga, atau kerabat yang memiliki kedekatan khusus dilarang mencalonkan diri sebagai pemimpin secara berturut-turut pada kantor yang sama di suatu daerah, distrik, legislatif, provinsi, kota, atau kotamadya (barangay).

Politik dinasti dimaknai sebagai upaya seorang penguasa atau pemimpin baik di tingkat presiden/gubernur/bupati/walikota yang telah habis masa jabatannya, untuk menempatkan keluarga sebagai calon pengganti atau penerus penguasa sebelumnya untuk periode berikutnya (Slamet Soemiarno, 2010:20). Dengan kata lain, politik dinasti mengarah kepada suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan berdasarkan hubungan darah atau kekerabatan. Politik dinasti ini bahkan berkembang dalam dimensi yang lebih alami, dalam bentuk upaya mendorong sanak keluarga elite-elit incumbent untuk terus menerus memegang kekuasaan di pemerintahan yang telah diwariskan oleh pendahulu mereka, melalui persiapan putra-putri dari penguasa yang bersangkutan kedalam sebuah system pendidikan dan rekrutmen politik secara dini.

Meskipun secara konstitusional Filipina melarang praktik politik dinasti, namun pada kenyataan justru politik dinasti tetap berlangsung dan berkembang tidak hanya pada lingkup pemilihan legislatif, kongres, tetapi juga terjadi pada pemilihan presiden. Hal itu ditunjukkan dengan terpilihnya sejumlah pemimpin yang berasal dari keluarga penguasa sebelumnya, seperti Gloria Arroyo yang merupakan anak dari mantan presiden ke-9 Filipina Diosdado P. Macapagal, Benigno Simeon Aquino III merupakan anak dari Corazon Aquino, dan Fidel Ramos yang adalah anak dari Narciso Renca Ramos, seorang diplomat pada zaman pemerintahan Marcos (E. Eva-Lotta Hedman, 2006:5-44). Hal yang sama juga di temukan oleh Pablo Querubin dalam kajiannya yang berjudul *Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines*, yang menunjukkan kuatnya politik dinasti di Filipina menjelang pemilihan pemimpin baik di tingkat pusat (presiden) maupun di tingkat daerah provinsi dan distrik (P. Querubin, 2010: 110).

Politik dinasti yang berkembang di Filipina telah lama menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat yang menolak politik dinasti beranggapan politik dinasti mempersempit ruang bagi masyarakat lain untuk terpilih karena adanya dominasi dari dinasti keluarga penguasa. Penolakan terhadap politik dinasti ini juga didasarkan pada perilaku pemimpin yang berasal dari dinasti keluarga yang selama ini terbukti lebih memperhatikan kelompoknya dibandingkan dengan luar dinastinya. Namun terdapat pula kelompok masyarakat yang menerima politik dinasti sebagai suatu yang wajar, dengan alasan bahwa Pasal 26 ini justru merupakan jaminan yang sama bagi

semua warga negara, termasuk anggota dinasti, sebaliknya pembatasan merupakan bentuk ketidakadilan bagi mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan penguasa.

Terlepas dari sikap pro dan kontra masyarakat mengenai politik dinasti yang berkembang di Filipina, politik dinasti selama ini secara prinsip telah menjadi sandungan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut negara Filipina. Ancaman dari politik dinasti ini terhadap sistem demokrasi adalah upayanya untuk hanya menampilkan calon-calon pemimpin yang berasal dari keluarga-keluarga mantan penguasa sebelumnya. Bahaya lain dari politik dinasti adalah kecenderungan untuk mengkultuskan mantan penguasa sebelumnya sehingga masyarakat tidak lagi peduli mengenai kompetensi yang dimilikinya untuk menjadi seorang pemimpin. Bila hal ini terjadi, maka sistem demokrasi yang diterapkan menjadi tidak berfungsi lagi karena pemimpin yang dipilih bukan lagi berdasarkan sistem demokrasi, tetapi berdasarkan hubungan keluarga dan kekerabatan. Merujuk pada penjelasan di atas penulis mencoba menjelaskan keterhubungan struktur sosial, dan Klan yang ada di masyarakat terhadap keberlangsungan Politik Dinasti di Filipina.

### **Politik Dinasti, Struktur Sosial Masyarakat, dan Klan Politik di Filipina**

#### ***Politik Dinasti***

Politik dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan primitif yang mengandalkan hubungan darah dan keturunan dari segelintir orang (E. Clubok, N. Wilensky & F. Berghorn, 1996:1035). Di dalam dinasti politik peran publik kurang dipertimbangkan. Politik dinasti merusak sistem demokrasi karena sistem ini berusaha mengekalkan kekuasaan di kalangan kelompok atau dinastinya sendiri. Dinasti merupakan musuh demokrasi dalam arti yang substansial. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Ernesto Dal Bó dkk *“Political dynasties have long been present in democracies, raising concerns that inequality in the distribution of political power may reflect imperfections in democratic representation”* (E. Dal Bó, P. Dal Bó & J. Snyder, 2009:115). Politik dinasti menjadi salah satu hambatan dalam menegakkan esensi sistem politik yang demokratis.

Kekhawatiran mengenai politik dinasti yang mengancam sistem demokrasi didasarkan pada sejumlah hasil penelitian seperti yang diargumenkan oleh Mosca: *“every class displays the tendency to become hereditary, in fact if not in law” (our translation) and that even when political positions are open to all, a family tie to those already in power would confer various advantages”* (E. Dal Bó, P. Dal Bó & J. Snyder, 2009:115). Mosca mengemukakan bahwa dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat, selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah

biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Clubok, Wilensky, dan Berghorn mengemukakan bahwa politik dinasti dalam konteks politik kontemporer muncul dalam berbagai bentuk, termasuk bentuk yang lebih halus dengan cara mendorong sanak saudara keluarga elit-elit lama untuk terus memegang kekuasaan yang diturunkan “secara demokratis” oleh para pendahulu mereka ((E. Clubok, N. Wilensky & F. Berghorn, 1996:1035-1062). Ada juga dalam bentuk politik dinasti yang disesuaikan dengan etika demokrasi modern, yakni dengan cara mempersiapkan putra-putri atau anggota keluarga yang bersangkutan dalam sistem pendidikan dan rekrutmen politik secara dini. Kemunculan anggota-anggota keluarga pada periode berikutnya seolah-olah bukan diakibatkan oleh karena faktor darah dan keluarga, melainkan karena faktor-faktor kepolitikan yang wajar dan rasional (F.P. II Muga dalam B.M. Tuazon (ed.) 2007:133). Politik dinasti semacam ini masih sering terjadi pada negara-negara demokratis, misalnya Amerika Serikat dan India.

Bentuk lain dari politik dinasti muncul secara vulgar dan identik dengan otoritarianisme. Politik dinasti seperti ini muncul dari suatu sistem politik modern yang sebelumnya sudah dibekukan dan dikondisikan sedemikian rupa sehingga rakyat melalui wakilnya hanya bisa memilih anak/isteri dari keluarga penguasa lama. Politik dinasti yang demikian menunjukkan bahwa orang yang dipilih bukan karena atas dasar sukarela, tetapi secara represif. Sistem pemerintahan yang berdasar pada kuasi-otoritarian merupakan dasar munculnya politik dinasti. Sistem ini relatif lebih elegan karena masih mempertimbangkan dedikasi politik demokratis dengan mempersiapkan secara matang calon penguasa yang akan datang.

Tipe politik dinasti lainnya muncul semata-mata sebagai bagian dari mekanisme reproduksi kekuasaan pribadi yang vulgar dan memanfaatkan sistem demokrasi yang baru. Dalam mekanisme ini, politik dinasti berkolaborasi secara intens dengan politik uang, kapitalisme media, dan budaya patronase. Uang, media, dan budaya patronase dipakai dan dimanipulasi untuk mengontrol penampilan dan meraup justifikasi politik. Gejala politik dinasti seperti ini menguat di Filipina.

### **Struktur Sosial Masyarakat Filipina**

Salah satu struktur sosial yang paling menonjol di negara ini sejak peradaban awal adalah budaya pengelompokan kelas yang menciptakan budaya patron klien. Di Filipina, sejak peradaban awal masyarakatnya telah terbentuk

pembedaan kelas yang meliputi kelas-kelas Maginoo, Timawa, Maharlika, dan Alipin (R.D. Leano Jr. & R.M. Corpuz, 1997:12). Kelas-kelas sosial ini memiliki akses yang berbeda dalam kepemilikan tanah, kebebasan, dan hak-hak. Kelas sosial Maginoo merupakan kelompok penguasa yang terdiri dari Datu, raja, dan orang-orang yang memiliki kekayaan atau status sosial tinggi dalam masyarakat. Kelas sosial ini secara langsung berkaitan dengan sistem pemerintahan, di mana Datu berperan sebagai pemimpin pemerintahan sementara kelas sosial lainnya adalah pelayan. Sebutan atau gelar Datu dapat diperoleh melalui garis keturunan darah atau jika rakyat biasa menunjukkan kemampuan yang luar biasa, terutama dalam tindakan keberanian dan kepahlawanan. Kelas sosial Timawa adalah kelas masyarakat biasa dan bebas dari Luzon dan Visayas yang bisa memiliki tanah mereka sendiri dan yang tidak harus membayar upeti ke Maginoo. Meski demikian, dari waktu ke waktu mereka diwajibkan untuk bekerja pada tanah Datu dan membantu dalam proyek dan acara masyarakat. Kelas sosial Maharlika merupakan kelas sosial kelompok pelayanan militer kepada Datu. Pelayanan yang diberikan adalah atas biaya sendiri. Kelompok sosial ini ditugasi untuk berperang dan pada saat perang kelompok sosial ini melakukan rampasan perang yang kemudian diserahkan kepada pemimpinnya. Kelas sosial Maharlika umumnya memiliki hak yang sama dan tanggung jawab seperti pada kelas sosial Timawa. Terakhir, kelas sosial Alipin merupakan kelas sosial tawanan perang, masyarakat yang tidak mampu membayar utangnya, semua anak tidak sah (melalui perkawinan tidak sah), para budak belian, dan pelaku kriminal.

Pembagian kelas sosial tersebut telah menciptakan budaya patron-klien, yakni kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Perbedaan kelompok sosial pada masyarakat awal Filipina tersebut kemudian semakin mendapat legitimasi ketika negara ini menjadi jajahan Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang yang juga membentuk sebuah struktur kelas. Kondisi sosial, sistem pemerintahan, ekonomi, dan budaya masyarakat Filipina pada saat penjajahan Spanyol, Amerika Serikat, dan Jepang tidak jauh berbeda dengan sebelum penjajahan. Struktur sosial sangat dipengaruhi oleh akulturasi budaya, sosial, ekonomi, agama, dan sistem pemerintahan yang datang dari luar. Tampak bahwa masyarakat lokal Filipina dikendalikan sepenuhnya oleh penguasa atau penjajah. Kelas sosial didasarkan pada kekayaan dan pendidikan. Kelompok *principalis* pada masa kekuasaan Spanyol atau kelompok *borjuis* (kelas atas) pada masa kekuasaan Amerika Serikat memosisikan diri sebagai pihak yang berkuasa. Di sini juga sangat kental terlihat budaya patron-klien, antara majikan dan budak. Kelompok sosial kelas atas mengendalikan sistem pemerintahan, budaya, ekonomi, dan sistem sosial, sedangkan kelompok bawah hanya mengikuti. Kondisi kemiskinan dan keterbelakangan juga dijadikan sebagai kesempatan untuk menguasai kelompok kelas sosial rendah. Setelah Filipina merdeka, posisi pemimpin berada ditangan kaum bangsawan

dan terpelajar seperti Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, dan Diosdado Macapagal. Magsaysay adalah anggota Kongres dari Provinsi Zambales dan veteran unit gerilya non-Huk selama perang, kemudian menjadi menteri pertahanan pada tahun 1950. Pada masa ini, partai politik mulai bermunculan di Filipina. Salah satu partai politik yang diprakarsai oleh Magsaysay adalah Partai Nacionalista yang sekaligus mengantarkan ia sebagai presiden pada bulan April 1953. Setelah Magsaysay tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat di bulan Maret 1957, Wakil Presiden Garcia dilantik menjadi presiden. Pada pelaksanaan pemilu tahun 1957, Diosdado Macapagal – ayah Gloria Macapagal Arroyo – berhasil terpilih sebagai wakil presiden. Macapagal maju sebagai kandidat dari Partai Liberal dan merupakan pertama kalinya wakil presiden terpilih dari partai yang berbeda. Pada saat pemilihan presiden tahun 1961, Macapagal terpilih sebagai presiden. Kepemimpinan Macapagal membawa perubahan di Filipina dengan perbaikan ekonomi, salah satunya program penciptaan seribu lapangan kerja bagi masyarakat dan berhasil, sehingga citra Macapagal di masyarakat sangat bagus, yang nantinya di manfaatkan kembali oleh dinasti penerusnya di masa depan seperti pencitraan yang dilakukan oleh Arroyo pada saat pemilu.

Terbentuknya pembagian kelas sosial yang telah mengakar sejak peradaban awal masyarakat Filipina sampai dengan masa modern saat ini ternyata tidak mudah ditinggalkan. Masyarakat menganggap hal itu sebagai suatu hal biasa sehingga pada praktiknya budaya perbedaan kelas sosial tersebut masih nyata dijumpai sekarang ini. Ada penokohan yang secara langsung tertanam dalam diri masyarakat Filipina. Masyarakat Filipina secara tidak langsung menerima struktur social yang terbentuk dari jaman dulu hingga sekarang sebagai sebuah “given”. Bahwa ada orang-orang atau golongan tertentu yang memang menempati posisi/kedudukan sebagai pemerintah atas mereka, dan mereka harus menghormati itu, selayaknya struktur yang terbentuk mulai dari jaman nenek moyang mereka. Struktur yang telah terbentuk ini melekat, dan turun temurun ada di masyarakat sehingga membentuk sebuah patron-klien yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya di masyarakat yang kita kenal dengan sebutan budaya patronase.

Tampilnya Gloria Macapagal Arroyo sebagai kandidat presiden pada pemilihan presiden tahun 2004 merupakan indikasi budaya patronase dari dinasti Macapagal. Arroyo pada saat berkampanye lebih banyak mengagungkan Diosdado Macapagal sebagai seorang figur yang berwibawa, kharismatis, dan mampu memberikan atau menyediakan lapangan pekerjaan daripada mengekspos kemampuan dirinya sendiri. Macapagal sang ayah benar-benar dijadikan sebagai patron yang harus diikuti dan dicontoh seorang pemimpin, dalam hal ini Arroyo mengklaim dirinya memiliki sifat-sifat kepemimpinan tersebut.

Demikian pula pada pemilihan presiden tahun 2010 juga menunjukkan budaya politik patronase oleh dinasti politik Aquino. Benigno Aquino III melakukan pencitraan dengan meningkatkan kembali masyarakat atas dinasti Aquino yang memiliki wibawa dan keberhasilan menggulingkan kediktatoran Marcos (K. Kushida, 2003:120). Bagi masyarakat Filipina, jasa dari Corazon dan suaminya sangat besar terkait dengan perubahan sistem pemerintahan di negara tersebut. Pandangan semacam ini secara tidak langsung telah mempatronkan Aquino sebagai simbol kekuatan politik yang harus diikuti atau dicontoh ( J. Silvestre, 2006: 165).

Terpilihnya Arroyo pada tahun 2004 dan Benigno pada tahun 2010 sebagai presiden menunjukkan bahwa masyarakat Filipina pada kenyataannya masih menyukai pemimpin berdasarkan kedekatan secara emosional, ketokohan, simbol-simbol kebesaran, dan memiliki sumber daya ekonomi yang kuat seperti yang dimiliki dinasti politik Macapagal dan Aquino. Masyarakat tidak sepenuhnya memilih Arroyo dan Benigno berdasarkan kompetensi dan kapabilitas yang mereka miliki, melainkan berdasarkan gambaran orang tua masing-masing. Hal itu dapat dilihat dari hasil perolehan suara oleh Arroyo pada tahun 2004 dan Benigno di tahun 2010, yang sangat signifikan dibandingkan dengan kandidat lainnya. Pemilihan yang dilakukan masyarakat tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi lebih pada emosional. Pihak masyarakat yang sudah terjebak dalam hubungan patronase akan cenderung sangat setia pada pihak patron, tanpa pertimbangan rasional. Selain itu budaya patron berimbas pada hilangnya daya kritis masyarakat, terhadap situasi politik. Ikatan yang kuat antara patron dan klien menempatkan patron sebagai pemimpin yang selalu benar meskipun terkadang melakukan tindakan yang irasional.

### **Klan**

Kondisi sosial lain yang mendukung dinasti politik di Filipina pada pemilihan presiden adalah budaya klan. Sejak awal budaya klan di negara ini sangat kuat. Budaya klan dapat dilihat dari garis keturunan suku-suku atau ras asli Filipina, yakni Negritos, proto-Melayu, dan Melayu. Budaya klan di kalangan masyarakat Filipina kemudian semakin mendapat penegasan pada masa jajahan Spanyol ketika masyarakat diwajibkan untuk mengadopsi nama Spanyol – berupa nama-nama baptis atau orang kudus – yang diikuti oleh nama klan di belakangnya. Adopsi nama ini semakin menguatkan budaya klan di kalangan masyarakat Filipina. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya klan yang ada di masyarakat Filipina. Situasi ini berimbas pada dunia politik dengan membentuk klan-klan politik. Klan politik merupakan suatu wadah yang bertujuan untuk menampung aspirasi politik berdasarkan klan. Melalui klan politik ini, setiap anggota klan dapat menyampaikan hak-hak politiknya.

Berdasarkan data tahun 2011, terdapat 280 klan di Filipina yang memiliki kekuasaan politik dan wilayah masing-masing. Setiap klan berusaha dan berjuang untuk memenangkan calon yang berasal dari klan politiknya (P. Kreuzer, 2005:70). Dan terdapat 12 klan yang ada Filipina yang pernah menduduki jabatan, seperti ditunjukkan pada table dibawah ini :

**Tabel**  
**12 Klan yang Pernah Menduduki Jabatan Presiden di Filipina**

No.	Klan Politik Keluarga	Keterangan	
		Nama	Posisi
1	<u>Laurel</u> Clan	Jose P.J laurel	menjabat sebagai presiden Filipina ke-3 sejak 14 Oktober 1943- 17 Agustus 1945
2	<u>Osmena</u> Clan	Sergio Osmena	menjabat sebagai presiden Filipina ke-4(pengganti) sejak 30 Desember 1944-28 Mei 1946
3	<u>Roxas</u> Clan	Manuel Roxas	menjabat sebagai presiden Filipina ke-5 sejak 28 Mei 1946-15 April 1948
4	<u>Quirino</u> Clan	Elpidio Quirino	menjabat sebagai presiden Filipina ke-6 sejak 17 April 1948-30 Desember 1953
5	<u>Magsaysay</u> Clan	Ramon Magsaysay	menjabat presiden Filipina ke-7 sejak 30 Desember 1953-17 Maret 1957
6	<u>Garcia</u> clan	Carlos P. Garcia	menjabat sebagai presiden Filipina ke-8 menjabat sejak 18 Maret 1957-30 Desember 1961
7	<u>Macapagal</u> Clan	Diosdado Macapagal	Mnjabat sebagai presiden Filipina ke-9 menjabat sejak 30 Desember 1961-30 Desember 1965
8	<u>Marcos</u> Clan	Ferdinan E. Marcos	menjabat sebagai presiden Filipina ke-10 sejak 30 Desember 1965-25 Februari 1986
9	<u>Aquino</u> Clan	Corazon Aquino	menjabat sebagai presiden Filipina ke-11 sejak 25 Februari 1986- 30 Juni 1992
10	<u>Ramos</u> Clan	Beniqno S. Aquino III	Menjabat sebagai presiden Filipina ke-15 sejak 30 Juni 2010- sekarang
11	<u>Estrada</u> Clan	Fidel V. Ramos	menjabat sebagai presiden Filipina ke-12 sejak 30 Juni 1992-30 Juni 1998
12	<u>Arroyo</u> Clan	Joseph Estrada	Menjabat sebagai presiden Filipina ke-13 sejak 30 Juni 1998- 20 Januari 2001
		Gloria Arroyo	Menjabat sebagai presiden Filipina ke-14 sejak 20 Januari 2001- 30 Juni 2010

Sumber: Country Profile Philippines

Dari 12 klan yang pernah menjabat sebagai presiden, hanya ada 3 klan yang paling populer yakni: klan Aquino yang berada di provinsi Tarlac, klan Macapagal dan klan Arroyo yang berada di provinsi Camarines Sur, Pampanga, Negros Occidental.



Partai dan klan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan di Filipina (P. Kreuzer, 2005:32). Setiap klan memiliki partai politik dan memiliki wilayah tersendiri. Di Filipina, klan diartikan sebagai sebuah organisasi informal terdiri dari jaringan individu yang terhubung dengan kerabat berbasis obligasi (surat perjanjian atau kontrak kerjasama saling memajukan). Obligasi yang dimaksud baik vertikal maupun horisontal, menghubungkan elit dan nonelit, dan mencerminkan baik hubungan darah maupun kekerabatan fiktif (P. Querubin, 2010: 110). Klan ini didasarkan pada ikatan afektif kekerabatan sebagai esensinya yang merupakan identitas dan ikatan klan sebagai organisasi. Meskipun klan juga organisasi politik, klan tidak berasal dari politik. Sebaliknya, klan pada dasarnya luas, organisasi sosial, juga aktif di arena politik untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya. Uraian mengenai klan tersebut menunjukkan bahwa klan memiliki hubungan yang erat dengan partai politik. Dimana partai politik menjadikan klan sebagai basis massa. Klan sebagai sebuah organisasi, tidak mampu mencapai tujuan kelembagaan pada tingkat yang lebih tinggi, namun melalui partai politik, klan dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Di pedesaan, klan dipimpin oleh para pemimpin tradisional yang biasanya dilegitimasi melalui usia dan status silsilah, sedangkan di daerah perkotaan, dipimpin oleh seseorang yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih mapan karena dengan itu dipandang dapat mengontrol klan tersebut. Klan ini memiliki jaringan yang luas yakni: masyarakat miskin, kerabat dan sanak saudara, teman dekat, perempuan, pemuda, dan anak-anak yang termasuk anggota nonelit. Klan juga lintas garis kelas dan didasarkan pada prinsip-prinsip kebersamaan (P. Kreuzer, 2005:33).

Klan politik Macapagal yang memiliki basis utama di Provinsi Pampanga . daerah Luzon Tengah wilayah III, merupakan barometer dan mesin politik bagi dinasti Arroyo dalam memenangkan dirinya sebagai presiden. Kondisi masyarakat di wilayah ini banyak yang menganggur dan berpendidikan rendah. Mata pencaharian masyarakat umumnya adalah bertani, dengan sepertiga penduduk dari wilayah ini tinggal di desa-desa. Provinsi ini sejak lama terkenal sebagai salah satu wilayah yang paling rawan menjelang dan saat pelaksanaan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan presiden di Provinsi Pampanga juga terkenal sebagai yang paling banyak menghabiskan dana. Kondisi masyarakat dengan pengetahuan politik yang masih rendah membutuhkan sosialisasi yang lebih dibandingkan dengan wilayah lain. Di wilayah ini biasanya juga sering terjadi pembelian suara yang dilakukan kandidat atau elit politik dengan biaya yang cukup besar, yakni sekitar US\$ 60 per suara (Philippine Senate, 2007).

Loyalitas klan Arroyo terlihat ketika Arroyo berusaha dan berhasil mengukudeta Presiden Estrada yang terindikasi melakukan korupsi, melalui demonstrasi

besar-besaran oleh masyarakat Filipina. Demikian pula pada pemilu 2004, ketika Arroyo berusaha kembali memenangkan pemilu atas kandidat Fernando Poe jr. Berdasarkan hasil perhitungan suara, dapat diketahui bahwa kedua kandidat memiliki basis klan partai politik di 17 wilayah. Salah satu indikator yang menunjukkan basis wilayah masing-masing kandidat dapat dilihat dari jumlah perolehan suara yang cukup menonjol dibandingkan dengan kandidat lainnya seperti dilaporkan Kongres dan NAMFREL dalam tabel berikut.

**Tabel**  
**Perolehan Suara Secara Nasional Hasil Pemilu Filipina Tahun 2004**  
**berdasarkan Laporan NAMFREL dan Kongres**

Area	Congress		NAMFREL		Discrepancy (%)
	GMA (%)	FPJ (%)	GMA (%)	FPJ (%)	
Philippines	40,0	36,5	39,4	36,9	0,9
ARMM	61,9	30,6	38,8	58,0	50,5
Central Mindanao	32,2	39,2	24,0	44,5	13,5
Cordillera Administrative Region (CAR)	39,5	26,1	38,0	28,6	4,1
Northern Mindanao	43,1	42,2	40,8	43,9	3,9
Western Mindanao	48,3	39,6	44,7	39,9	3,8
Caraga	54,4	30,4	53,5	30,7	1,3
Southern Mindanao	41,2	41,8	40,6	41,9	0,6
Southern Tagalog	24,2	44,9	24,2	45,3	0,5
Overseas Absentee Voting (OAV)	45,0	19,6	44,4	19,2	0,2
Bicol	28,9	24,9	27,9	23,8	-0,1
NCR	26,5	36,7	26,5	36,5	-0,2
Cagayan Valley	32,3	44,7	32,6	44,4	-0,5
Central Visayas	72,4	16,2	72,6	15,9	-0,5
Easter Visayas	45,4	43,3	45,7	42,9	-0,6
Western Visayas	58,9	25,8	59,4	25,4	-0,9
Ilocos	35,8	43,8	35,6	42,3	-1,3
Central Luzon	37,6	42,5	39,2	41,5	-2,6

Note: Congress count is 100 percent complete; NAMFREL 83 percent  
Sumber : (R. Verzola, 2004:92-118)

Demikian pula klan politik Aquino yang memiliki basis wilayah di Provinsi Tarlac di Luzon Tengah, Wilayah III. Tarlac pernah dijadikan sebagai daerah pengasingan dan pembuangan pada masa jajahan Spanyol. Di Propinsi Tarlac, nama Aquino sudah menjadi salah satu tren atau merek politik. Nama Aquino demikian populer sejak mantan presiden Filipina Corazon Aquino dan suaminya yang seorang senator senior berjuang memimpin perlawanan kepada Marcos sang diktator. Nama besar dan loyalitas klan orang tuanya dimanfaatkan oleh Nonoy jr. untuk mensukseskan kemenangan klan Aquino atas kandidat lain, yang terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel**  
**Hasil Pemilihan Presiden Filipina pada Pemilu Tahun 2010 berdasarkan**  
**Laporan COMELEC**

Kandidat	Partai	Hasil
		Suara
<a href="#">Benigno Aquino III</a>	Liberal	13,842,049
<a href="#">Joseph Estrada</a>	PMP	8,758,675
<a href="#">Manny Villar</a>	Nacionalista	5,014,237
<a href="#">Gilberto Teodoro</a>	Lakas-Kampi	3,674,832
<a href="#">Eddie Villanueva</a>	Bangon Pilipinas	1,026,270
<a href="#">Richard Gordon</a>	Bangunbayan-VNP	467.658
<a href="#">Nicanor Perlas</a>	Independen	48.956
<a href="#">Jamby Madrigal</a>	Independen	42.192
<a href="#">John Carlos de los Reyes</a>	Ang Kapatiran	40.070
Total suara tidak valid		2.010.269
Total suara dari para pemilih		<b>33.078.703</b>
Suara terdaftar		<b>51.292.465</b>

Sumber : Commission on Elections (COMELEC), Certified list of candidates with votes obtained, Records and Statistics Division, Republic of the Philippines, 2010

Selain kapasitas massa dan wilayah yang dimiliki oleh kedua klan, sumber daya ekonomi yang kuat juga merupakan salah satu kekuatan dari kedua klan. Mapannya perekonomian kedua klan berkorelasi terhadap kemampuan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan politik termasuk dana kampanye dan pemilu.

Klan politik di Filipina membangun jaringan yang kuat dengan cara bergabung dalam wadah partai politik yang memiliki kesamaan tujuan, dan menempatkan anggotanya di lembaga-lembaga pemerintahan mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat (L.T. White, 2009). Hal ini terlihat pada peningkatan anggota kongres yang berasal dari klan. Pada periode pemerintahan Arroyo, misalnya, anggota Kongres didominasi oleh klan politiknya dan mereka yang masih termasuk dalam hubungan keluarga sebesar 68% (R.U. Mendoza, D.B. Yap II, E.L. Beja & V.S. Venida, 2011). Klan politik ini berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara saling mendukung mulai dari tingkat daerah hingga nasional, dimana pada tingkat

daerah, peran sebuah klan dimainkan oleh para tokoh adat atau orang-orang yang memiliki kuasa untuk menggerakkan dan mendukung klan tersebut. Sementara di perkotaan, anggota klan yang memiliki ekonomi mapan memainkan peran penting, termasuk untuk mendanai klan yang ada di tingkat daerah.

Hal positif yang didapatkan partai politik dengan menggunakan klan sebagai basisnya adalah bahwa anggota klan memiliki loyalitas yang sangat tinggi, bahkan sekalipun harus mengorbankan nyawa mereka. Kesetiaan para anggota klan berlaku untuk klan mereka dan kepemimpinannya. Loyalitas anggota klan ini akan menguntungkan partai politik karena mereka akan loyal pada partai tersebut. Sebuah klan dapat melebur pada partai politik, terutama didasarkan pada kesamaan tujuan. Klan dan partai politik dapat terpecah ketika tidak ada kesamaan tujuan. Hubungan klan dengan partai politik akan semakin kuat ketika anggota klan merasakan kepentingannya yang terwakili. Keberadaan klan di dunia modern, dalam konteks politik modern dimaknai sebagai sebuah jawaban atas runtuhnya kekerabatan di dunia modern. Loyalitas anggota klan terhadap klannya ditunjukkan dengan pertempuran antar klan untuk memperebutkan kekuasaan dan membela kelompok klan seperti yang terjadi di Filipina.

### **Penutup**

Dalam penerapan larangan atas politik dinasti pemerintah belum konsisten, dimana masih sebatas dalam tataran teoritis, sementara dalam tataran praktis belum sungguh-sungguh diterapkan. Sehingga pemimpin yang terpilih kerap kali berasal dari kerabat penguasa sebelumnya atau minimal kerabat salah satu pemangku jabatan di pemerintahan

Politik dinasti di Filipina akan terus berlangsung dalam pemilihan baik di tingkat daerah maupun provinsi, baik legislatif maupun presiden, apabila tidak dilakukan pembenahan atas pemahaman politik masyarakat Filipina kearah yang lebih baik. Jadi bukan hanya kesungguhan aplikasi aturan perundang-undangan oleh pihak pemerintah tetapi juga pembenahan pola pikir masyarakat terhadap kehidupan politik.

## Daftar Pustaka

- Asako, Y., T. Iida, T. Matsubayashi & M. Ueda, "Dynastic legislators: Theory and evidence from Japan" 12 March 2010, <<http://www.psci.unt.edu/~tmatsubayashi/research/seshu.pdf>>, diakses 17 Maret 2012.
- Clubok, E., Wilensky, N. & Berghorn, F. 1996. "Family Relationships, Congressional Recruitment, and Political Modernization", *The Journal of Politics*, vol. 31, no. 4, hal. 1035-1062.
- Commission on Elections (COMELEC). 2010. *Certified list of candidates with votes obtained, May 14, 2001 party list elections*. Records and Statistics Division, Republic of the Philippines.
- Dal Bo, E., Dal Bo, P. & Snyder, J. 2009. "Political Dynasties", *Review of Economic Studies*, vol. 76, no. 1, hal. 115-144.
- De-Dios, E. & Ferrer, R.D. 1999. "Corruption in the Philippines: Framework and context", *Public Policy*, vol. 3, no. 3, hal. 35-54.
- Hedman, Eva-Lotta E. 2006. "The Spectre of Populism in Philippine Politics and Society: Artista, Masa, Eruption", *South East Asia Research*, vol. 9, no. 1, hal. 5-44.
- Kervliet, B.J.T. 1992. *Everyday Politics in the Philippines, Class and Status Relations in a Central Luzon Village*. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Kreuzer, P. 2005. 'Political Clans and Violence in the Southern Philippines,' *Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) Report*, No. 71.
- Kushida, K. 2003. "The Political Economy of the Philippines under Marcos" *Stanford Journal of East Asian Affairs*, vol. 3, no. 1, hal. 119-126.
- Leano Jr, R.D. & Corpuz, R.M. 1997. *Different Social Classes in Philippines*. Manila: Rex Bookstore.
- Library of Congress-Federal Research Division. 2006. *Country Profile: Philippines*. Manila: Library of Congress.
- Mendoza, R.U., Yap II, D.B., Beja, E.L. & Venida, V.S. 2011. *An Empirical Analysis of Philippine Political Dynasties in the 15th Philippine Congress*, Risalah disajikan pada Konferensi Persiapan Pertumbuhan Inklusif, 23 September 2011.
- Muga, F.P. II. 2007. 'On Stakeholder-based Allocation Method: A fair allocation of power in Philippine Party-List System,' dalam B.M. Tuazon (ed.), *Oligarchic politics: Elections and the Party List System in the Philippines*. Quezon City: CenPeg Books.
- Philippine Senate. 2007. *An act strengthening the political party system, appropriating funds therefore and for other purposes*. 14th Congress, 1st session SB 67.
- Querubin, P. 2010. *Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines*. Cambridge Massachusetts Institute of Technology.

- Silvestre, J. 2001. "The Rise of Women Leaders in the Philippines: A Study of Corazon Aquino and Gloria Macapagal-Arroyo", *The Berkeley McNair Research Journal*, vol. 11, no. 4, hal. 165-178.
- Sison, A.J.G. 2006. "The Public and the Private in Contemporary Philippine Society: A Study on Political Dynasties", *Asian Journal of Political Science*, vol. 17, no. 3, hal. 265-284.
- Soemiarno, Slamet. 2010. *Buku Ajar III Bangsa, Budaya, dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Balai Penerbit UI.
- Verzola, R. 2004. "The True Results of the 2004 Philippine Presidential Election Based on the NAMFREL Tally", *Philippine Journal of Third World Studies*, vol. 19, no. 2, hal. 92-118.
- White, L.T., Local Money and Power in Taiwan, East China, Thailand, and the Philippines (online), 23 August 2009, <<http://www.worldscibooks.com/eastasiastudies.com>>, diakses 20 Maret 2012.
- The 1987 Constitution of The Republic of The Philippines.